

Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Media Cetak

Oleh:

I.M. Hendrarti

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This paper deals with an analysis of news on the issue of women's reproductive health. The data are selected from seven local newspapers. The research found out that the number of news that exposed women's reproductive health was significant. In the period of Juli to Agustus 2007 issue on women's health was adequately exposed. The main topic of women's health was related to the women's reproductive health. To be specific, it usually dealt with the process of child bearing and the high rates of women's mortality during child labor. The problem is that the news is embedded with patriarchal point of view in which women are denied voice.

Keywords: *women's reproductive health, feminism, gender identity, journalism*

Pendahuluan

Sejalan dengan era Reformasi, keikutsertaan Indonesia selaku anggota PBB dalam menyetujui Deklarasi Millenium pada tahun 2000 memberi isyarat bahwa Indonesia sudah membuka diri (bahkan memberikan komitmen) untuk mendukung gerakan kesetaraan gender (*gender equity*). Komitmen ini tertuang secara umum dalam *Millenium Development Goals*, tujuan ketiga tentang promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dan juga tujuan kelima tentang perbaikan kesehatan ibu (United Nations 2005). Adapun Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Implikasi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan internasional ini adalah, idealnya, adanya advokasi serta berbagai kebijakan yang mengarah kepada kesetaraan gender. Secara lebih terperinci, kebijakan-kebijakan ini harus mengarah kepada penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan, kesetaraan gender dalam pendidikan, kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kesetaraan gender dalam pekerjaan dan pendapatan, serta kesetaraan dalam partisipasi sosial dan politik (United Nations 2005, UNICEF 2007). Adapun muncul kesadaran baru bahwa dengan kesetaraan hak perempuan dan juga hak perempuan sebagai ibu maka kualitas hak serta kesejahteraan anak secara umum juga akan menjadi lebih baik.

Walau sudah ada berbagai pergerakan progresif ini, masih perlu diselidiki apakah figur perempuan yang muncul dalam wacana publik (seperti media cetak) sudah mulai mengadopsi sudut pandang progresif ini. Tulisan ini merupakan usaha untuk menelusuri wacana kultural tentang kesehatan reproduksi perempuan. Asumsi dasar yang melandasi tulisan ini adalah mempertanyakan sudut pandang yang digunakan orang dalam menciptakan wacana kultural tentang kesehatan reproduksi perempuan. Apakah wacana tentang kesehatan reproduksi perempuan (kapasitasnya sebagai ibu) itu benar-benar dibuat dan dilihat dari sudut pandang perempuan atau pihak lain, yang didominasi oleh kelompok yang sangat patriarkis, misalnya: suami, penguasa, petugas kesehatan dan lain sejenisnya? Dalam wacana publik, fakta yang menyangkut sudut pandang tentang kesehatan reproduksi perempuan sebenarnya sangat penting namun selalu tak-pernah diperhitungkan oleh pemegang hegemoni sosial-politik. Konsekuensinya, pengertian tentang kesehatan reproduksi perempuan tidak pernah dipertanyakan secara kritis bahkan selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang telah sesuai kodrat.

Wacana Publik dan Ide Kultural tentang Peran Perempuan

Dalam wacana publik yang sudah mapan selama ini, peran dasar perempuan yang dianggap normal adalah peran feminin-masokistik, pasif, dan peran keibuan yang mengorbankan diri. Untuk memenuhi peran ini, perempuan harus menekan atau mengingkari semua sifat agresivitas dan sensualitas yang ada dalam kepribadian perempuan agar supaya mereka dapat menumbuhkan rasa keibuan mereka. Stereotipe tentang perempuan baik ini secara langsung mengarah kepada ide kultural tentang kodrat perempuan yaitu menjadi ibu. Konsekuensinya, masyarakat yang mendukung wacana kultural semacam itu akan mengidealkan tingkah laku perempuan yang sesuai dengan watak “ibu yang baik”, yang memilih aktualisasi komitmennya untuk mencintai, mengasuh dan memelihara anaknya. Dengan kata lain, masyarakat akan cenderung memberi stigma terhadap perempuan yang dianggap kurang trampil dalam melakukan kewajiban keibuan tersebut. Sebaliknya, mereka tidak akan memberikan stigma terhadap laki-laki, apa pun watak dan perangnya, karena tanggungjawab dalam mengasuh anak dianggap bukan merupakan kodratnya.

Perspektif sosial terhadap perempuan yang seperti ini membuat perempuan mempunyai sikap yang ambivalen terhadap

masa depan mereka dalam menjalani hidup mereka. Sikap ambivalen ini terjadi karena adanya konflik internal dalam diri perempuan. Di satu sisi mereka harus memiliki komitmen untuk menjadi ibu terhadap anaknya,¹ di sisi lain, mereka harus memiliki komitmen pula untuk mengembangkan diri di luar peran domestik/maternal perkawinan (misalnya lewat karier dan pekerjaan).

Ide kultural tentang sifat mutlak dan kodrati perempuan sebagai ibu di dalam aspek maternal dan domestik ini di dasarkan pada konsep “*maternal responsibility*” (tanggungjawab keibuan) (Suleiman 1988). Konsep ini terasa lebih manusiawi daripada pandangan (dan tuntutan) bahwa perempuan harus sanggup menjadi ibu yang serba bisa dan dapat menangani segala permasalahan anak serta aspek domestik keluarga. Namun demikian, tak-peduli apakah perempuan sebagai ibu merasa tak-kuasa dan kewalahan dalam mengasuh anaknya, semua kejadian buruk yang menimpa anaknya dianggap sebagai tanggung-jawab mereka sepenuhnya. Barangkali di sinilah letak dari ketidak-adilan kultural bagi perempuan; mereka dianggap ada (sebagai orang yang menjalankan peran maternal

¹ Konflik ini disebabkan oleh perasaan perempuan sebagai ibu yang menganggap bahwa anaknya membutuhkan dirinya dan bergantung total hanya kepada dirinya dan bukan kepada orang lain meskipun orang lain itu adalah figur ayah.

dan domestik) namun aspirasi dan sudut pandang perempuan sering dianggap tidak ada/tidak berarti (*present but absent*) (Kaplan 1992). Apabila anaknya tumbuh berkembang baik, peran perempuan sebagai ibu itu dianggap sudah sewajarnya sesuai kodrat, sebaliknya apabila anaknya tumbuh kurang semestinya, mereka pantas diberi stigma secara kultural. Kultur yang memihak ini merupakan bukti bahwa aspirasi perempuan sebagai ibu jarang dilihat dari sudut pandang perempuan itu sendiri. Anehnya, kultur patriarki yang cenderung memberi beban kesalahan kepada perempuan ini tidak pernah dikritisi oleh kebanyakan kaum perempuan sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena kebanyakan perempuan sudah menginternalisasi kewajiban maternal yang nanti akan (atau sedang) dijalannya. Padahal persepsi ini sebenarnya hanyalah fantasi belaka, karena pada kenyataannya, tidak ada seorang pun perempuan ibu di dunia ini yang bisa selalu mengatasi dan mengetahui segala-galanya atau memiliki tanggung jawab absolut terhadap nasib anaknya.

Perempuan Indonesia, secara relatif, memiliki kemandirian dalam keluarga, dibandingkan dengan perempuan di kelompok masyarakat lain (Geertz 1963, Errington 1990). Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak ditemukan perempuan yang menjadi pedagang di

pasar-pasar tradisional. Dengan berprofesi sebagai pedagang, para perempuan ini memiliki kemandirian di bidang ekonomi keluarga. Bahkan para perempuan yang tidak memiliki pekerjaan pun dianggap memiliki kemandirian ekonomi karena merekalah yang lazimnya mengatur ekonomi keluarga.

Namun pada praktiknya, peran sosial perempuan yang mandiri ini juga dibayang-bayangi oleh ideologi gender yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan posisi kaum pria. Ideologi gender ini mengajarkan bahwa perempuan sebagai ibu tidak pantas untuk merasa setara, apalagi dominan, di hadapan suaminya. Dengan kata lain, perempuan yang telah mandiri secara ekonomi maupun pendidikan tetap harus merasa bergantung atau tunduk, secara sosial dan kultural, pada pasangan prianya atau figur laki-laki lain (ayah, paman atau kakak laki-laki). Berdasarkan kenyataan itu, Hatley (1990) menduga bahwa di Indonesia terdapat ambivalensi dalam diri para perempuan berkenaan dengan posisi sosial dan kultural mereka.

Karena posisi perempuan ibu dalam kultur patriarki di Indonesia bersifat ambivalen, maka para perempuan yang memiliki karier dan mandiri secara profesional menghadapi persoalan sosial yang cukup serius. Mereka seringkali harus berperan sebagai (a) isteri yang berposisi

subordinat di bawah suami yang secara sosial telah dinobatkan sebagai kepala keluarga, (b) ibu yang bertanggung jawab merawat anak dan menjalankan pekerjaan domestik dalam keluarga tetapi sekaligus (c) harus bisa berdiri bebas sebagai manusia mandiri yang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Tentu saja, peran ganda ini tidak gampang dijalankan oleh seorang perempuan ibu tanpa konflik yang lumayan pelik ketika ia dituntut untuk melaksanakan aneka norma sosial yang sesuai dengan wacana kultural yang berkembang di masyarakat kita.

Pada tahun 2003, pernah dilakukan penelitian media (pemberitaan media cetak) mengenai wacana publik terhadap peran perempuan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam pemberitaan media cetak, peran perempuan cenderung didefinisikan dalam peran mereka sebagai ibu. Selain itu, pendapat atau perspektif perempuan sendiri sebagai ibu jarang dimunculkan, bahkan jika masalahnya menyangkut kesehatan ibu itu sendiri. Yang justru ditonjolkan oleh media massa adalah wacana yang berasal dari para penegak hukum (dalam kasus aborsi) dan/atau dari para petugas kesehatan (dokter). Oleh para wartawan, pendapat mereka ini sering dikutip dan dianggap “objektif” sehingga pantas untuk menjelaskan kesehatan perempuan. Akan tetapi, pendapat-pendapat para ahli

kesehatan ini hanya cenderung memberikan beban *maternal responsibility* (tanggungjawab keibuan) begitu berat kepada perempuan ibu hamil tanpa melihat hubungannya dengan permasalahan struktural seperti kemiskinan dan buruknya layanan kesehatan.

Penelitian tahun 2003 itu menyimpulkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara wacana tentang peran dan fungsi perempuan yang dikembangkan di masa Orde Baru dan wacana di masa Reformasi. Pada zaman Orde Baru, figur perempuan dianggap sangat lemah dan pasif sehingga mereka perlu dikelola dalam organisasi-organisasi wanita, seperti, PKK, Persit atau Darma Wanita. Bahkan perempuan dianggap tak memiliki pengetahuan tentang kondisi tubuhnya sendiri. Nasib dan keselamatan perempuan sebagai ibu dan anaknya harus dipercayakan pada figur-figur dan institusi dominan. Di zaman Reformasi, wacana tentang peran dan fungsi perempuan sedikit bergeser. Aneka macam wacana yang sarat dengan larangan dan anjuran dilontarkan untuk membatasi gerak dan peran perempuan. Seolah-olah hanya perempuan sajalah yang harus bertanggungjawab untuk menjaga dan melaksanakan proses reproduksi yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Wujud dari hak perempuan:

Sesuai dengan *Millenium Development Goals* (MDG) yang sudah disebut sebelumnya, dua *point* penting yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di semua negara (termasuk Indonesia) yang telah meratifikasinya adalah (1) kesetaraan gender, dan (2) peningkatan kesehatan bagi perempuan ibu. Tugas media massa (termasuk pers) tentu saja menyebarkan program MDG itu.

Makna dari itu, isu kesehatan perempuan (*point* 2), barangkali, lebih mudah dipahami tetapi “kesetaraan gender” (*point* 1) masih perlu diinterpretasikan, walaupun keduanya saling berkaitan. Oleh sebab itu, alangkah tepatnya apabila interpretasi itu dikaitkan dengan berbagai isu yang memicu lahirnya CEDAW. Isu kesetaraan gender itu mencakup: (a) kesetaraan dalam hal ekonomi atau akses ke sumberdaya atau lebih konkretnya adalah hak memperoleh pekerjaan, (b) kesetaraan dalam hal memperoleh pendidikan, (c) kesetaraan dalam hal menjalankan aktivitas politik. Apabila kedua macam *point* yang ditegaskan dalam MDG itu digabungkan, maka beberapa isu/topik (dan isu pelanggaran terhadap *point* itu) berikut ini seharusnya menjadi berita utama dalam media massa, termasuk media cetak.

1. **Kesehatan** perempuan ibu
2. Kesetaraan dalam memperoleh **pekerjaan**
3. Kesetaraan dalam memperoleh **pendidikan**
4. Kesetaraan dalam menjalankan aktivitas **sosial-politik**

Tabel 1

Apakah para pekerja di media cetak di Jawa Tengah telah memahami hak perempuan dan melaksanakan tugas untuk menyebarkan informasi tentang itu? Untuk menjawab pertanyaan (yang berkaitan dengan *appeals to principle*) ini perlu dicarikan bukti otentik yang berkaitan dengan beberapa kata-kunci yang termuat dalam kotak *Framing Devices*. Maksud dari kelima kata-kunci itu adalah sarana *framing* yang berkaitan dengan “penggunaan bahasa verbal”, misalnya: metafora, frasa, contoh, penggambaran, dan “sarana visual”, misalnya: *lay out*, separasi, foto, dan penempatan halaman.

Dalam penelitian ini, berita yang dianalisis berasal dari media cetak yang diseleksi selama bulan Juli – Agustus 2007. Berbagai isu atau topik tentang perempuan dapat disarikan dalam dalam tabel 2 di bawah ini.

| No | Isu atau topik | Frame Inti | Jumlah |
|----|-------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Umum/ringan | Isu umum/ringan | 1283 |
| 2 | Kekerasan thd perempuan | Kekerasan | 274 |

| | pada umumnya | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|-----|
| 3 | Isu khusus perempuan pada umumnya | Isu khusus | 117 |
| 4 | Tenaga Kerja Wanita (TKW) | Hak/kegiatan sosial | 106 |
| 5 | Kesehatan | Hak/kegiatan sosial | 90 |
| 6 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Kekerasan | 83 |
| 7 | Pembunuhan terhadap perempuan | Kekerasan | 50 |
| 8 | Pekerja Seks Komersial (PSK) | Hak/kegiatan sosial | 44 |
| 9 | Kekerasan seksual terhadap perempuan | Kekerasan | 17 |
| 10 | Olah-raga | Hak/kegiatan sosial | 16 |
| 11 | Pageblug | Isu khusus | 14 |
| 12 | Pendidikan | Hak/kegiatan sosial | 3 |

Tabel 2: Ranking berita tentang perempuan berdasarkan jumlah topik

Sekarang silakan membandingkan isu dalam tabel 2 ini dengan isu penting yang menjadi point MDG di atas, yakni, hak perempuan untuk memperoleh akses ke fasilitas: (1) kesehatan, (2) pekerjaan, (3) pendidikan, dan (4) sosial-politik, yang

telah dipaparkan di atas. Berbagai isu/topik yang berasal dari *frame* inti itu merupakan wujud konkret dari hak perempuan. Dalam kategori “hak/kegiatan sosial” itu, terdapat lima isu/topik, (a) s/d (e), yang bisa dikelompokkan menjadi: (1) isu tentang pekerjaan (a) dan (b), (2) isu tentang kesehatan (c), (3) isu tentang pendidikan (d), dan (4) isu tentang sosial/politik (e).

Representasi dari hak perempuan:

Apakah perempuan telah memperoleh liputan yang memadai dalam hal kegiatan mereka?

Pertama, isu pekerjaan menikmati *ranking* tertinggi dalam studi tersebut, yakni: 146 berita atau 56,3% dari total 259 berita yang mencerminkan wujud dari hak perempuan di masyarakat, namun semua orang yang membaca fakta ini mungkin akan heran ketika melihat bahwa isu pekerjaan perempuan yang dianggap memiliki kadar *newsworthy* oleh pekerja pers di Jawa Tengah adalah hal yang berkaitan dengan profesi yang sering dimaknai secara *derogatory*, sebagai TKW (106) dan PSK (44). Bahkan jumlah berita tentang PSK itu lebih tinggi dari pada jumlah berita tentang kesehatan perempuan (3). Apakah ini memberikan bukti bahwa para pekerja pers di Jawa Tengah masih terjebak pada *frame* inti yang patriarkis?

Kedua, isu tentang kesehatan cukup memperoleh porsi berita, berjumlah 90,

atau rata-rata 1,5 berita per hari selama bulan Juli s/d Agustus 2007. Sedikit lebih baik dari pada isu tentang kegiatan sosial/politik yang direpresentasikan dalam berita tentang kegiatan “olah-raga” oleh perempuan, yang hanya memperoleh angka 16.

Ketiga, isu tentang pendidikan bagi perempuan memperoleh porsi berita yang paling minim (3). Seolah-olah, perempuan di Jawa Tengah telah memperoleh kesetaraan dengan laki-laki dalam hal pendidikan sehingga tidak perlu mendapat liputan khusus. Barangkali, menurut *frame* inti para pekerja media, pendidikan hanya perlu bagi anak, bukan bagi perempuan sehingga *ratio* perbandingan beritanya sangat mencolok, yakni: 1095 : 3.

Keempat, isu tentang kegiatan sosial/politik oleh perempuan masih kurang memperoleh liputan meskipun sedikit lebih baik dari pada isu pendidikan. Namun, anehnya representasi dari kegiatan sosial/politik oleh perempuan itu hanya berkaitan dengan kegiatan olah-raga (16). Barangkali, kegiatan politik praktis oleh perempuan dianggap oleh para pekerja media cetak sebagai berita umum (yang tak-dianalisis dalam studi ini), bukan berita khas perempuan, sehingga luput dari pengamatan.

Berita Tentang Kesehatan Perempuan

Dalam kesempatan ini, yang menjadi topik utama adalah berita tentang kesehatan perempuan. Berita semacam itu sebagian besar dikaitkan dengan kesehatan reproduksi perempuan yakni berupa berita tentang kematian ibu saat melahirkan. Perhatikan contoh beberapa berita berikut ini:

(No. 1) “13 Ibu Meninggal saat Melahirkan”

Wonosobo, Ketua PKK Wonosobo Hj Kusi Kholiq mengungkapkan angka kematian ibu (AKI) pada saat melahirkan di daerah ini meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Pada tahun 2006 tercatat 11 ibu meninggal ketika melahirkan dan saat ini saja Agustus 2007 sudah mencapai 13 kasus. **(24/08/07)**

(No. 2) Kematian Ibu dan Bayi Tinggi

Pemalang. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pemalang menyebutkan setengah tahun terakhir, Januari-Juli 2007, setidaknya 20 dan 63 bayi meninggal dunia terkait persalinan yang dijalani. Penyebab kematian ibu biasanya keracunan lebih-lebih di waktu nifas. Sedangkan bayi dari proses persalinan yang kurang tepat. DKK setempat berusaha mempromosikan persalinan yang baik. **(31/08/07)**

Berita nomer 1 dan 2 merupakan *straight news* berisi laporan tentang pendapat para pejabat atau petugas kesehatan. Berita tentang kematian ibu ini dilengkapi dengan data berupa angka-angka kematian.

Pendapat para petugas kesehatan tersebut ditampilkan untuk mempromosikan kegiatan mereka, lihat berita no. 2. Namun, karena berita tersebut berupa *straight news*, pembaca (terutama perempuan) tidak mendapatkan manfaat apa-apa mengenai rahasia atau kesulitan dalam proses melahirkan yang mengancam jiwa mereka.

Selain berita tentang kesehatan reproduksi, para penulis berita juga sering memberitakan tentang perempuan (terutama PSK) yang terinfeksi HIV-AIDS. Mereka itu ditampilkan sebagai pihak yang paling berpotensi menularkan penyakit tersebut. Perhatikan contoh berita tentang hal tersebut berikut ini:

(No. 3) “Penderita AIDS Diminta Dikarantina”

Batang_Pemkab Batang diminta mengarantina para penderita HIV/AIDS sembari diberi pengobatan. Tujuannya, untuk **mengeliminasi penyebaran HIV/AIDS** ke masyarakat umum. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi B, Slamet Maskuri, kemarin. “Kenyataannya, penularan HIV/AIDS kini tak lagi terbatas pada kelompok resiko tinggi seperti **pekerja seks** atau pengguna narkoba. Tapi, penyebarannya ke masyarakat umum juga makin cepat. Jadi saya usulkan, agar **pemkab mengarantina PSK penderita HIV/AIDS** sambil diberi pengobatan,” katanya. **(05/07/07)**

Penulis berita di atas melaporkan pernyataan seorang anggota DPRD yang

khawatir tentang penularan HIV-AIDS. Nara sumber menyatakan bahwa peran perempuan PSK sangat berpotensi menularkan HIV-AIDS. Oleh karena itu, para perempuan PSK yang menderita HIV-AIDS harus dikarantina. Nampaknya penulis berita bersetuju dengan pendapat nara sumber karena ia menyatakan pula bahwa tindakan mengarangtina perempuan PSK dianggap sah untuk “mengeliminasi penyebaran HIV/AIDS”. Untuk itu, penulis berita perlu mengadopsi bahasa asing, “mengeliminasi” yang berasal dari *to eliminate*. Namun penulis berita mengadopsi kata *elimination* yang dalam bahasa aslinya merupakan kata benda diindonesiakan menjadi kata kerja.

Akhir-akhir ini hampir semua media cetak memunculkan *feature* tentang kesehatan alat reproduksi perempuan yaitu mengenai kanker leher rahim. Salah satu contoh dari *feature* tersebut menyatakan demikian:

(No. 4) Mendekati usia kepala empat, RM **sibuk berkarier** dan menikmati peran sebagai istri dan ibu dari satu anak. Namun impian untuk hidup bahagia bersama keluarga sirna ketika ia dinyatakan terkena kanker leher rahim. Ancaman kematian membayangkannya. **Rasa sesal** karena sebelumnya tidak pernah menjalani uji *papsmear* untuk mendeteksi secara dini penyakit itu pun **menderanya** (11/05/09).

(No. 5) Mereka yang berisiko tinggi terkena kanker serviks adalah perempuan yang **tidak pernah menjalani skrining, mulai berhubungan seksual dan punya anak pada usia muda, memiliki anak lebih dari lima orang, punya beberapa pasangan atau riwayat ganti-ganti pasangan, serta memiliki kebiasaan merokok** (11/05/09)

Feature seperti ini mengungkapkan fakta yang dikemas melodramatis. Ia memberi beban kepada para pembaca perempuan untuk merasa bersalah mengabaikan bagian tubuhnya (yang sangat penting berkaitan dengan perannya sebagai istri dan ibu) yang akan mengancam kebahagiaan keluarganya. Kata-kata “rasa sesal” yang “mendera” membuat pembaca dicekam ketakutan yang dirasakan oleh obyek berita. *Feature* seperti ini lebih cocok sebagai rekaman kuliah di fakultas kedokteran atau iklan layanan masyarakat daripada sebagai *feature* tentang kesehatan reproduksi perempuan. Pada *feature* nomer 5, pembaca disodori beberapa hal yang merupakan pesan para pejabat kesehatan dalam hal usaha *preventip* mencegah kanker leher rahim. Bandingkan tulisan serupa yang menjelaskan lebih baik tentang ancaman kanker leher rahim bagi para pembaca perempuan:

(No. 6) Adapun faktor-faktor yang meningkatkan seorang wanita terkena kanker serviks adalah: wanita yang menikah muda (dibawah 20 tahun), memiliki partner seksual lebih dari satu, infeksi menular seksual, merokok, defisiensi vitamin A, C dan E.

Namun ini tak menutup kemungkinan penularan terjadi pada wanita yang melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan saja, masih terdapat faktor-faktor lain yang bisa menularkan virus HPV.

Bandingkan *feature* No.5 dengan *feature* No.6. Pembuat *feature* No.6 memberikan penjelasan lebih rinci dan terkesan berhati-hati (kalau tidak boleh dibilang obyektif) dibandingkan pembuat berita No.5 walaupun keduanya melaporkan tentang hal yang sama berdasarkan wawancara dengan seorang ahli kesehatan. Dalam berita No.6 tidak terlihat sikap menghakimi obyek berita. Perhatikan bagian yang di *highlight* pada *feature* No.5 dan No. 6. Deskripsi tentang perempuan yang rentan terkena kanker leher rahim di *feature* No. 5 cenderung meremehkan ancaman kanker leher rahim (cervix). Pembuat *feature* menulis bahwa hanya perempuan yang memiliki partner seksual lebih dari satu (perempuan yang setia) yang bisa terkena infeksi virus HPV, penyebab kanker leher rahim. Penjelasan ini menghapus kenyataan bahwa banyak sekali perempuan yang memiliki satu partner seksual sampai akhir hayatnya terkena kanker leher rahim.

Penulis *feature* No. 5, menggaris bawahi dengan tegas bahwa penderita kanker leher rahim yang termasuk dalam kategori yang dideskripsikannya memiliki gaya hidup yang tidak baik. Sementara dalam *feature* No. 6, penulis berusaha tidak membatasi penyebab kanker leher rahim pada gaya hidup yang tidak dikehendaki. Kata-kata ‘banyak faktor lain’ membuat para penderita kanker leher rahim tidak “dihakimi” atau dipaksa dikelompokkan ke dalam komunitas dengan gaya hidup yang di stigmatisasi. Kenyataannya, ada beberapa pasien kanker leher rahim yang rajin menjalankan *papsmear*, suatu ketika mendapatkan dirinya terpapar kanker leher rahim serius.

Namun demikian, baik *feature* No. 5 maupun No. 6 tidak mengkritisi keadaan yang dialami para perempuan pengidap kanker leher rahim. Misalnya apakah pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai bagi para perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi? Para pembuat *feature* tersebut tidak menyinggung pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang biayanya tidak terjangkau oleh para perempuan penderita kanker leher rahim. Oleh karena itu, walaupun ada sedikit perbedaan, kedua *feature* tersebut cenderung menempatkan tanggung jawab reproduksi perempuan kepada para perempuan sendiri. Dengan kata lain, karena strategi “*blaming the*

victim” yang dipakai oleh para pembuat *feature* cenderung “menyalahkan” para perempuan penderita kanker leher rahim (Ryan 1976)². Akhirnya, para perempuan itu “sudah jatuh tertimpa tangga pula.”

Simpulan

Dari contoh-contoh yang diberikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana sebaiknya para pembuat berita menyajikan berita tentang kesehatan perempuan yang ramah perempuan. Berikut ini tip-tip yang perlu dipertimbangkan ketika para pembuat berita memburu berita, sumber berita, dan objek berita berkaitan dengan isu kesehatan perempuan:

1. Kritisi nara sumber apakah pendapatnya bias gender. Artinya apakah mereka cenderung menyalahkan perempuan atau menempatkan perempuan sekedar sebagai objek bukan subjek. Bahkan pendapat nara sumber perempuan bisa saja bias gender karena sudut pandang yang digunakan dipengaruhi pandangan patriarki (lihat *feature* no. 5).
2. Berita tentang kesehatan reproduksi perempuan bukan iklan layanan masyarakat yang biasanya menempatkan

perempuan sebagai objek. Berikan tempat kepada perempuan (terutama yang memiliki masalah kesehatan) untuk berbicara atas namanya sendiri.

3. Isu kesehatan perempuan menyangkut pula kebijakan pemerintah jadi bukan hanya kesalahan para perempuan. Berita/*feature* yang tidak mengkritisi kebijakan pemerintah akan cenderung menyalahkan perempuan yaitu memakai strategi “*blaming the victim*”
4. Kultur masyarakat perlu pula dikritisi terutama yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi perempuan. Masyarakat patriarki sering menganggap alat reproduksi perempuan sebagai hal penting tapi juga remeh karena mereka cenderung melihatnya sebagai ‘mesin’ produksi, bukan sebagai bagian tubuh **manusia** yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan hal ini adalah kultur media cetak yang ‘patriarkis’ karena menganggap isu kesehatan perempuan sebagai hal yang tidak penting. Penempatan berita tentang kesehatan perempuan dikalahkan oleh berita lain sehingga tidak pernah berada di halaman pertama atau jarang menjadi *headline*.
5. Berita atau *feature* menyangkut kesehatan perempuan sebaiknya tidak dikemas melodramatis. Pembaca perempuan tidak identik dengan penyuka melodrama.

² William Ryan (1976) dalam bukunya *Blaming the Victim*, New York:Vintage Book, mengatakan bahwa stigma kepada kelompok subordinat selalu diberikan lepas dari konteks sosio-kulturalnya. Hambatan-hambatan sosio-kultural yang dimiliki kelompok subordinate diabaikan untuk mencapai kesimpulan menyalahkan kelemahan/kekurangan kelompok subordinat.

Daftar Pustaka

- Errington, Shelly (1990) Recasting Sex, Gender and Power: A Theoretical and Regional Overview. In *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Diedit oleh Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington. Stanford: Stanford UP., pp. 1-58.
- Geertz, Hildred (1963) Indonesian Culture and Communities. In *Indonesia*. Diedit oleh Ruth Thomas McVey. New Haven: Human Relations Area Files, pp. 24-96.
- Hatley, Barbara (1990) Theatrical Imagery and Gender Ideology in Java. In *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Diedit oleh Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington. Stanford, California: Stanford UP, pp. 177-208.
- Kaplan, Ann E. (1992) *Motherhood and Representation: The Mother in Popular Culture and Melodrama*. London-New York: Routledge
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 1981. United Nations General Assembly.
- Ryan, W. 1976. *Blaming the Victim*. New York: Vintage.
- Suleiman, S. 1988. "On Maternal Splitting: A Propos of Mary Gordon's Men and Angels" dalam *Sign* 14(1):25-41.
- UNICEF. 1989. *Information Kit on the Convention of the Rights of the Child, including text CRC*.
- UNICEF. 2006. *The State of the World's Children 2007*. New York: UNICEF.
- United Nations. 2005. *The Millenium Development Goals Report 2005*. New York: United Nations.